



Collaborative Governance Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Medan

Selwyn Radja Siburian¹, Muhammad Imanuddin Kandias Saraan² Hatta Ridho³

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: imankandias@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 08 Mei 2025

Revised 18 Mei 2025

Accepted 01 Juni 2025

Available online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: XXX

P-ISSN: XXX

How to cite:

Siburian, S. R & Saraan, M. I. K. (2025). Collaborative Governance Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Medan. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2)

ABSTRAK

.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Collaborative Governance antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Medan. Sehingga perlu adanya kolaborasi antar pemerintah untuk menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan data, jumlah ODGJ di Kota Medan menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya, dengan berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan stigma sosial terhadap penderita gangguan jiwa. Penelitian ini mengacu pada empat indikator keberhasilan Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007), yaitu: desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi, dan kondisi awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-stakeholder belum sepenuhnya sinergis, terutama dalam membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan situasi, kondisi, dan proses kolaborasi yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lembaga masyarakat dalam menangani permasalahan skizofrenia. Hasil penelitian ini berdasarkan indikator Ansell dan Gash (2007) menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Medan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kejelasan mengenai regulasi dan tugas fungsi yang harus dilakukan Selama ini dalam penanganan skizofrenia di Kota Medan, kedua Dinas selalu melakukan tugasnya secara mandiri atau masing-masing instansi. Belum terjalannya kerjasama dengan baik antar kedua Dinas tersebut.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Skizofrenia, Good Governance*

ABSTRACT

This research aims to describe the implementation of Collaborative Governance between the community and the government in handling People with Mental Disorders (ODGJ) in Medan City. So there is a need for collaboration between governments to deal with People with Mental Disorders (ODGJ) as listed in the 1945 Constitution. Based on data, the number of ODGJ in Medan City shows a significant increase every year, with various challenges such as lack of public understanding, limited health facilities, and social stigma towards people with mental disorders. This research refers to four indicators of the success of Collaborative Governance according to Ansell and Gash (2007), namely: institutional design, facilitative leadership, collaboration process, and initial conditions. The research results show that collaboration between stakeholders is not yet completely synergistic, especially in building trust, effective communication and clear division of responsibilities. This research uses a descriptive method with a qualitative approach to describe the situation, conditions and collaboration process involving the Health Service, Social Service and community institutions in dealing with schizophrenia problems.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

The results of this research based on the indicators of Ansell and Gash (2007) show that the collaborative governance carried out by the Social Service and the Medan City Health Service is not optimal. This can be seen from the lack of clarity regarding the regulations and functional tasks that must be carried out. So far, in handling schizophrenia in the city of Medan, the two departments have always carried out their duties independently or at each agency. There has not been good cooperation between the two departments.

Keywords: Collaborative Governance, Skizofrenia, Good Governance

1. Pendahuluan

Gangguan jiwa muncul karena menurunnya fungsi mental pada seseorang sehingga implikasi dari penurunan fungsi tersebut akan bertingkah laku yang tidak wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum timbulnya gangguan jiwa pada seseorang diakibatkan karena adanya stres yang berlebihan, depresi, alcoholic (pecandu alkohol) dan faktor tekanan yang mempengaruhi dari luar dan dari dalam diri seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut (Jones et al, 2011), faktor penyebab Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yaitu faktor somatic (unsur dalam diri pasien yang mengakibatkan gangguan jiwa), psikologik (cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan serta mengembalikan tindakan), sosio-budaya, keturunan, konstitusi, cacat kongenital, deprivasi dini, pola keluarga yang patogenik, masa remaja, penyalahgunaan obat-obatan, psikodinamik (sebuah pendekatan psikologi yang menekankan proses bawah sadar).

Fenomena keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) bukan hal baru dalam kehidupan manusia. Sejak dulu mereka yang tergolong ODGJ dikenal sebagai orang gila dan istilah sekarang lebih dikenal dengan "tuna laras". Menurut Astati (2008:27) tunalaras berasal dari kata "tuna" yang berarti kurang dan "laras" berarti sesuai. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya, seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah social maladjustment terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku (juvenile delinquency). Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, ODGJ membutuhkan upaya penyembuhan yang khusus dan terstruktur agar dapat kembali normal sebagaimana mestinya dalam menjalankan kehidupan.

Dinas Kesehatan Kota Medan telah mendata sebanyak 3001 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di kota ketiga terbesar di Indonesia ini. Jumlah tersebut meningkat dari data pada Oktober 2022 sebanyak 3001 ODGJ atau orang dengan depresi berat. Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, drg Usma Polita Nasution diwakili Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular (PTM) dr Pocut Fatimah Fitri, MARS kepada wartawan di Medan, Senin (27/11). Jumlah 3001 ODGJ 2022 tersebut meningkat dari data 2020 sebanyak 2578 ODGJ di Medan. "Angkanya meningkat dari tahun ke tahun. Kita perhitungkan sampai Oktober 2020 ada 2578 ODGJ yang terdata di Dinas Kesehatan Kota Medan," katanya. Dinas Kesehatan Kota Medan mengatakan, jika dihitung berdasarkan luas Kota Medan, berarti setiap 0,9 per mil dari jumlah penduduk mengalami ODGJ berat.

Untuk membahas bagaimana menangani pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, Dinas Kesehatan Kota Medan mengadakan pertemuan monitoring dan evaluasi bersama tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM). Selain itu, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempersiapkan kelurahan siaga kesehatan jiwa. Perwakilan Yayasan Satu Hati Membangun yang terkait berbicara tentang membuat draf penanganan pasien ODGJ terlantar. Perwakilan Yayasan Satu Hati Membangun mengatakan bahwa banyak ODGJ yang belum mendapatkan layanan sosial dan kesehatan yang memadai. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menyelesaikan ODGJ terlantar dengan cara yang tepat.

Selama ini, penanganan kasus skizofrenia di Kota Medan merupakan wewenang dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Masyarakat. Dinas Sosial melakukan penanganan dalam hal respon kasus, pembinaan terhadap pasien dan memotivasi pasien untuk melakukan hal-hal positif. Sedangkan Dinas Kesehatan melakukan penanganana dalam hal medis, seperti memberikan obat bagi pasien rawat jalan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat seputar penanganan skizofrenia atau gangguan jiwa lainnya, serta tetap melakukan pengontrolan kepada pasien skizofrenia. Berbicara penyelesaian masalah dari hulu kehilir, bahwa kalau tidak ada kolaborasi antar Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan maka akan sangat sulit untuk melakukan tugas kedua Dinas tersebut.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016), dikenal sebagai metode penelitian naturalistik karena fokus penelitiannya terletak pada kondisi alamiah (naturalsetting). Metode ini dikenal dengan metode etnografi, terutama karena awalnya sering digunakan dalam penelitian dibidang antropologi budaya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka peneliti mengumpulkan informasi yang melalui pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami dan menjelaskan tentang collaborative governance dalam menangani penderita skizofrenia di Kota Medan serta menganalisisnya dengan rinci berdasarkan informasi dan informan.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Sosial Kota Medan, dan Yayasan Luhur Masyarakat. Alasan peneliti melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Sosial Kota Medan, dan Yayasan Luhur Masyarakat dikarenakan lokasi penelitian ini sesuai dengan karakter permasalahan yang peneliti angkat sehingga masyarakat Kota Medan diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian.

2.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena teknik pengumpulan data dalam penelitian ditujukan untuk mendapatkan data. Dalam hal ini, penelitian terkait masalah ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Observasi sering sekali diartikan sebagai kegiatan memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Menurut Arikunto (2002:133) Observasi, atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Sedangkan menurut Sutikno & Hadisaputra (2020:99) Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan pengindraan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah kegiatan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti, sedangkan observasi tidak langsung adalah kegiatan mengamati dengan menyimpulkan berbagai pendapat oranglain yang berada dalam lokasi penelitian. Dalam teknik observasi ini hal yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010:231). Wawancara sering digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian untuk mengetahui hal-hal yang ingin kita dapatkan dari informan terkait masalah dalam penelitian secara mendalam. Menurut Sutikno & Hadisaputra (2020:116) wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dan informan. Oleh sebab itu, maka wawancara dilakukan dengan menanyakan langsung kepada informan tentang ide-ide dan pendapatnya terkait permasalahan tersebut dimana peneliti harus mendengarkan dan mencatat poin poin penting yang dikemukakan oleh informan, peneliti juga bisa menggunakan alat bantu seperti handphone sebagai alat perekam suara yang telah disesuaikan agar tidak mengganggu jalannya proses wawancara. Tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh data dari stakeholders/petugas, berupa informasi yang terkait Collaborative governance antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di kota Medan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Dokumentasi yang dimaksud adalah semua jenis rekaman atau alat catatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti foto, buku-buku, arsip, atau dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media dokumentasi yang berupa

Collaborative governance antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di kota medan.. Cara ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian..

2.3 Penentuan Informan

Peneliti menggunakan Teknik purposive sampling dalam memilih dan menentukan informan. Informan kunci memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara terperinci dibandingkan orang lain, dan merupakan sumber data yang paling berharga bagi peneliti. Dalam mengumpulkan data yang akurat, maka peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik Purposive sampling, di mana peneliti sudah menentukan siapa saja yang akan diwawancarai dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini yang dijadikan informan oleh peneliti dalam penelitian Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Sosial Kota Medan, dan Yayasan Luhur Masyarakat antara lain sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Informan	Jenis Informan	Jumlah
1	Kepala bidang rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan	Informan Kunci	1
2	Staff Dinas Kesehatan Kota Medan	Informan Utama	1
3	Staff Dinas Sosial Kota Medan (URC)	Informan Utama	1
4	LSM (Yayasan Satu Hati Membangun)	Informan Tambahan	1
5	Masyarakat	Informan Tambahan	4

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

2.4 Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis data interaktif, dimana analisis dilakukan baik saat peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali, sejalan dengan pengumpulan data terkait efektivitas pelayanan kesehatan dalam menjamin kesehatan fisik bagi pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Binakarsa Medan. Menurut Huberman dan Miles (dalam Ibrahim (2018:111), teknik analisis data model interaktif dianggap sebagai metode analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis yang merinci, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan yang tidak diperlukan, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan kesimpulan akhir. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun ringkasan dari beberapa data yang relevan dengan permasalahan penelitian, dengan fokus pada data yang terkait dengan collaborative governance dalam menangani pendeita skizofrenia di Kota medan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tindakan menyusun sekelompok informasi dengan tujuan memungkinkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan melalui bentuk analisis, tabel, gambar, dan relasi antar kategori agar peneliti dapat memahami data dengan baik dan tidak terjebak dalam informasi yang tidak mendukung penyajian data. Proses penyajian data juga membantu peneliti dalam memahami informasi dan data yang telah diperoleh sebelumnya terkait dengan Collaborative governance antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di kota Medan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari analisis yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil tindakan. Kesimpulan ini berasal dari data yang telah diuji kepercayaan, kekuatan, dan validitasnya. Proses penarikan kesimpulan juga bergantung pada data yang telah diterima, termasuk hasil wawancara dengan informan dan observasi yang dilakukan peneliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari data hasil penelitian terkait efektivitas pelayanan

kesehatan dalam menjamin kesehatan fisik bagi pasien gangguan jiwa gangguan jiwa (ODGJ) di kota Medan.

2.5 Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2017:319) menyatakan bahwa untuk memastikan keabsahan (trustworthiness) data, diperlukan penggunaan teknik pemeriksaan. Peneliti memilih menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang disebut triangulasi, sebagaimana dijelaskan oleh Denzin (dalam Moleong, 2017:324). Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang melibatkan penggunaan beberapa sumber atau pendekatan lain. Berikut triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Triangulasi dengan sumber, seperti yang dijelaskan oleh Patton (dalam Moleong, 2017:330), artinya kita membandingkan dan mengecek kembali sejauh mana kita bisa percaya pada informasi yang kita dapatkan. Ini dilakukan dengan membandingkan data dari waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode, seperti yang dijelaskan oleh Patton (dalam Moleong, 2017:331), mencakup dua strategi. Pertama, melakukan pengecekan tingkat kepercayaan hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Kedua, melakukan pengecekan tingkat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2017:331), mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap fakta tidak dapat diuji hanya dengan satu teori atau lebih.

3. Hasil dan Pembahasan

Collaborative governance memainkan peran penting dalam penanganan odgj yang terlantar, seperti yang diuraikan dalam teori Ansell dan Gash (2007). Dalam konteks penanganan, collaborative governance melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, keluarga pasien, dan individu yang terkena skizofrenia itu sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas dalam upaya penanganan penderita skizofrenia. Menurut Ansell dan Gash (2007) keberhasilan penanganan odgj sangat bergantung pada seberapa baik proses kolaboratif ini dijalankan, yang melibatkan berbagai proses kolaboratif seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam kolaborasi, pemahaman bersama, dan hasil antara dari kolaborasi. Sebelum melakukan proses kolaborasi penting harus menentukan bagaimana kondisi awal pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama, disusul dengan desain kelembagaan seperti landasan hukum untuk menjalankan kolaborasi, lalu perlunya kepemimpinan dalam menjalankan proses kolaborasi. Dengan adanya collaborative governance, diharapkan akan tercipta lingkungan yang inklusif, mendukung, dan berkelanjutan bagi penderita skizofrenia di Kota Medan. Kolaborasi antar berbagai pihak juga dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap gangguan mental, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mental, dan meningkatkan kualitas hidup penderita skizofrenia.

3.1 Kondisi Awal

Ansell dan Gash (2007), menyatakan bahwa kondisi awal pemerintah merupakan faktor kunci dalam penanganan odgj. Mengelola dasar tingkat keyakinan, pertikaian, dan modul sosial yang menjadi aset atau tanggung jawab selama kerja sama untuk mencapai sasaran yang ingin diraih antara pihak-pihak yang berkolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penanggung jawab seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak meular dan Kesehatan jiwa, dinas Kesehatan Kota Medan menjelaskan bahwa

“Ya sebelum melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak kita harus tahu dulu apakah mereka memiliki tujuan yang sama dengan kita, jika sudah memiliki tujuan yang sama barulah kita menjalin kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, perusahaan swasta, LSM, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Kita menjalin kolaborasi tentunya karena perlunya bantuan dari berbagai pihak terutama masyarakat yaa terkait masalah yang kita hadapi terus menerus yaitu penanganan odgj yang terlantar di kota Medan Karena kalo hanya pemerintah saja yang melaksanakannya sedangkan masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai odgj maka makin banyak odgj yang dijauhkan dri masyarkat” (Hasil wawancara dengan ibu Ratna Dewi selaku penanggung jawab seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak meular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan , tanggal 13 November 2024)

Terkait dengan hasil wawancara sebelumnya yang mengatakan bahwasannya menentukan tujuan awal sangat diperlukan dalam menjalin kolaborasi. Dari hasil wawancara peneliti dengan (seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak meular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan , tanggal 13 November 2024) terlihat bahwa penanganan ODGJ terlantar di Kota Medan adalah isu kompleks karena melibatkan dimensi Kesehatan dan sosial. Pemerintah tidak dapat menangani masalah ini sendirian, sehingga perlu kolaborasi dengan masyarakat, LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan kesadaran. Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu kepala bidang rehabilitasi sosial

“Tentu kami ada melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, perusahaan swasta, LSM, masyarakat umum. Kita menjalin kolaborasi tentunya karena perlunya bantuan dari berbagai pihak terutama masyarakat atas adanya laporan masyarakat akibat odgj meresahkan masyarakat oleh karena itu masalah yang kita hadapi terus menerus yaitu masalah kesehatan jiwa yang harus terpenuhi untuk mewujudkan kesehatan yang paripurna (Hasil wawancara dengan ibu Marience selaku kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial kota Medan, tanggal Kamis 28 November 2024)

Kerja sama ini menunjukkan peran aktif pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman serta peduli terhadap individu yang membutuhkan pertolongan medis. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya yang mengatakan bahwasannya menentukan tujuan awal sangat diperlukan dalam menjalin kolaborasi. Dari hasil wawancara peneliti dengan (seksi di kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial kota Medan, tanggal Kamis 28 November 2024) Teori collaborative governance juga menekankan pentingnya mengelola konflik dan kompleksitas dalam kolaborasi lintas sektor. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan informasi, akan tetapi mereka tetap proaktif dalam mencari solusi seperti aktif dan sigap jika masyarakat melaporkan ke pihak pemerintah melalui call center. Kolaborasi ini telah dimulai sejak 2019 dengan melibatkan berbagai level pemerintahan dan terus berkembang. Dalam konteks penanganan ODGJ yang meresahkan masyarakat, manajemen konflik dan kompleksitas menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan dan memastikan keberlanjutan upaya penanganan.

3.2 Desain Kelembagaan

Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwasannya desai kelembagaan merupakan suatu kerangka kerja yang mengatur bagaimana berbagai aktor berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan kolaboratif. Penanganan Penderita Skizofrenia Di Kota Medan didukung dari pemerintah pusat sendiri itu ada Undang undang Nomor. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Untuk memastikan kolaborasi yang efektif, Nota Kesepahaman (MoU) digunakan sebagai dasar bagi kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Transparansi dalam pengelolaan data juga menjadi prioritas, dengan adanya kewajiban untuk saling tukar menukar data dan melaporkan odgj terlantar setiap enam bulan kepada Dinas Kesehatan (hasil wawancara dari ibu Ratna Dewi selaku penanggung jawab seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak meular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan, tanggal 13 November 2024).

Keberadaan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan di Kota Medan mencerminkan adanya struktur kelembagaan yang mendukung koordinasi penanganan odgj terlantar di kota medan. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa kombinasi antara dukungan hukum, prosedur kolaborasi, dan transparansi data berperan penting dalam penanganan odgj terlantar di kota medan yang berhasil di Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial kota Medan

“Terkait dengan landasan hukum ada beberapa yang mengatur mengenai koordinasi kelembagaan dalam penanganan odgj baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Dari pemerintah pusat sendiri itu ada Undang undang Nomor. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Namun jika odgj meresahkan masyarakat blom ada undang-undang yang berlaku mereka hanya akan dibawa

ke Rumah Sakit untuk melakukan CT Scan apakah terbukti memiliki kesehatan jiwa yang buruk atau tidak” (Hasil wawancara dengan ibu Marience selaku kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial kota Medan, tanggal Kamis 28 November 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ketidakterdapatannya undang-undang yang spesifik mengenai penanganan ODGJ yang meresahkan masyarakat bisa menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya kolaboratif yang lebih luas antara berbagai pihak untuk mengatasi kekosongan 72 regulasi dan menangani situasi yang mendesak seperti kasus ODGJ yang meresahkan. Hal tersebut juga sama dengan hasil wawancara oleh dinas Kesehatan

“Untuk dari pemerintah pusat sendiri itu ada Undang-undang Nomor. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Namun jika odgj meresahkan masyarakat blom ada undang-undang yang berlaku mereka hanya akan dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan CT Scan apakah terbukti memiliki kesehatan jiwa yang buruk atau tidak” (Hasil wawancara dengan ibu Ratna Dewi selaku penanggung jawab seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak meular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan , tanggal 13 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara langkah awal membawa ODGJ yang meresahkan ke rumah sakit untuk evaluasi kesehatan jiwa, seperti melalui CT Scan, dapat menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa individu tersebut menerima perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Kolaborasi antara lembaga kesehatan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya penting dalam proses evaluasi dan penanganan selanjutnya. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa kombinasi antara dukungan hukum, prosedur kolaborasi, dan transparansi data berperan penting dalam penanganan odgj yang berhasil di Kota Medan.

3.3 Kepemimpinan

Menurut Ansell dan Gash (2007), kepemimpinan dalam konteks kolaborasi melibatkan beberapa elemen krusial yang mendukung keberhasilan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan. Kepemimpinan yang efektif dalam kolaborasi ditandai dengan kemampuan untuk mengembangkan visi bersama dan menetapkan tujuan yang jelas, yang membantu dalam menyelaraskan kepentingan dan prioritas semua pihak yang terlibat. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatasi konflik, serta menjaga komunikasi terbuka dan transparan di antara anggota kelompok. Mereka harus mampu menciptakan dan memelihara kepercayaan, yang esensial untuk membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang harmonis. Selain itu, pemimpin yang baik juga harus fleksibel dan adaptif, mampu menghadapi berbagai tantangan, serta mendorong inovasi dan solusi kreatif dalam menghadapi masalah. Dalam kolaborasi, kepemimpinan tidak hanya melibatkan pengambilan keputusan, tetapi juga memfasilitasi partisipasi aktif, memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan merasa terlibat dan didengarkan. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif merupakan elemen kunci dalam menciptakan dan mengelola kolaborasi yang sukses. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial kota Medan menyatakan bahwa:

“Seorang pemimpin sangat penting dalam segala aspek untuk mencapai sebuah tujuan. Pemimpin yang netral dan dapat melihat berbagai kondisi diperlukan guna merendam dan mengelola berbagai konflik yang terjadi dan seorang pemimpin haruslah bijaksana dalam setiap situasi yang dihadapinya dengan kepentingan bersama (Hasil wawancara dengan ibu Marience selaku kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial kota Medan, tanggal Kamis 28 November 2024)

Selain itu, pemimpin yang berilmu dan berani menghadapi tantangan dapat menyelesaikan masalah dengan solusi yang menguntungkan semua pihak. Semua faktor ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam menjembatani komunikasi, menyelaraskan tujuan, dan memastikan keberhasilan kolaborasi dalam penanganan odgj yang terlantar. Berdasarkan wawancara peneliti dengan seksi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak meular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan menyatakan bahwa

Dalam proses kolaborasi seperti ini, faktor kolaborasi sangat penting dalam keberhasilan kerjasama penanganan odg. Pemimpin yang baik harus mampu menciptakan visi bersama yang jelas, menetapkan tujuan, serta mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapainya. Lalu pemimpin yang transparan dan komunikatif sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dan masyarakat (Hasil wawancara dengan ibu Ratna Dewi selaku penanggung jawab seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan , tanggal 13 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan menunjukkan bahwa kepemimpinan memainkan peran sentral dalam keberhasilan kolaborasi pengelolaan bank sampah. Pemimpin yang efektif harus mampu menciptakan visi bersama yang jelas dan menetapkan tujuan yang terukur, serta merancang strategi yang tepat untuk mencapainya.

3.4 Kolaboratif Proses

Ansell dan Gash (2007) proses kolaborasi melibatkan beberapa tahap penting yang bertujuan untuk membangun hubungan kerja yang efektif dan mencapai tujuan bersama. Model-model proses pemerintahan kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap. Kolaboratif proses, pihak yang berkolaborasi harus membangun komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dalam mencapai sebuah hasil. Proses merupakan hal yang penting tahapan kolaborasi.

3.4.1 Dialog Tatap Muka

Tahapan proses kolaborasi dialog tatap muka ini sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi bukan hanya diantara pemangku kepentingan saja tetapi juga dengan sasaran dari kolaborasi ini juga perlu dilakukannya dialog tatap muka agar tujuan yang ingin dicapai dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh pemerintah, LSM, masyarakat.

“Kami rutin mengadakan rapat koordinasi bersama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Satpol PP disaat ada laporan masyarakat jika 77 ada odg yang meresahkan. Kami juga mengadakan fgd dengan LSM, Keluarga ODGJ biasanya kami membahas informasi tentang jumlah dan lokasi ODGJ terlantar yang dilaporkan oleh masyarakat dan mengevaluasi program yang sudah berjalan, seperti efektivitas penjangkauan dan rehabilitasi, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. ya, kita mengadakan fgd dengan masyarakat dan pemerintah setempat pada bulan 5 juni 2024 dan baru aja penangkapan bersama dinas kesehatan pada 19 November 2024 sebanyak 3 odg” (Hasil wawancara dengan ibu Marience selaku kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial kota Medan, tanggal Kamis 28 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial kota Medan, tanggal Kamis 28 November 2024) bahwasannya pihak Dinas Sosial kota Medan juga ikut turut serta dalam memfasilitasi dialog dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan seperti pemaparan edukasi. kegiatan ini merupakan upaya penting dalam menciptakan dialog tatap muka yang efektif. Melalui FGD mampu mempertemukan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan odg. Kegiatan diskusi publik juga menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu odg. Sama halnya dengan dinas Kesehatan menyatakan bahwa

“Kami biasanya mengadakan rapat kerja lintas sektor setiap bulan untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing masing. Selain itu, kami juga sering melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) kita melaksanakan pertemuan pada bulan 5 juni 2024” (Hasil wawancara dengan ibu Ratna Dewi selaku penanggung jawab seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan , tanggal 13 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan, tanggal 13 November 2024) bahwasannya pihak Dnas Kesehatan kut turut serta dalam memfasilitasi dialog dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan seperti pemaparan edukasi. kegiatan ini merupakan upaya penting dalam menciptakan dialog tatap muka yang efektif.

Berdasarkan dari beberapa wawancara diatas menunjukkan bahwasannya dialog tatap muka yang dilakukan baik itu dari pihak pemerintah penanganan skizofrenia sudah cukup baik. Akan tetapi perlunya peningkatan frekuensi dan kualitas sosialisasi serta komunikasi yang lebih efektif untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam program siaga sehat jiwa. Dengan demikian informasi yang lebih jelas dan teratur, diharapkan lebih banyak warga akan terlibat secara rutin sehingga dapat mendukung upaya penanganan odgj yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3.4.2 Membangun Kepercayaan

Ansell dan Gash (2007) mengatakan bahwa kepercayaan adalah dasar dari semua kolaborasi yang berhasil dan harus dikembangkan melalui tindakan konsisten dan transparansi. Ketika kepercayaan terbangun, para pemangku kepentingan lebih mungkin untuk berkomitmen penuh pada kolaborasi. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan skizofrenia di kota Medan. Setiap tindakan dan kebijakan yang diambil selalu didasarkan pada data konkret dan nyata. Manajemen yang terbuka dan transparansi dalam pengelolaan data merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi yang efektif. Partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif. Hal ini juga didukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dinas Sosial :

“Kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan komunitas untuk mendekati masyarakat secara langsung melalui pemaparan edukasi. Tokoh lokal sering menjadi penghubung yang efektif dalam menyampaikan pesan dan menghilangkan stigma terhadap ODGJ” (Hasil wawancara dengan ibu Ratna Dewi selaku penanggung jawab seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan, tanggal 13 November 2024)

Membangun kepercayaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih memberikan pengetahuan dan informasi serta edukasi terkait program penanganan odgj yang sedang dijalankan dengan begitu masyarakat akan percaya bahwasannya program ini benar adanya dan dijalankan dengan pemerintah. Seperti wawancara peneliti dengan masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa :

“Masih karena jarang nya adanya diskusi bersama, saya berharap ada forum yang mempertemukan semua pihak pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk berdiskusi lebih sering lagi”

Dari beberapa masyarakat yang diwawancarai ada yang mulai membangun kepercayaannya ada juga yang tidak. Jawaban yang diberikan juga bervariasi, secara umum sebagian besar masyarakat merasa bahwa upaya pemangku kepentingan dalam membangun kepercayaan cukup baik, dengan mengapresiasi adanya sosialisasi dan informasi yang diberikan tentang manfaat dan cara kerja siaga sehat jiwa. Namun, ada juga yang merasa informasi yang diberikan kurang dipahami oleh semua orang dan beberapa lainnya kurang menyadari upaya yang dilakukan karena minimnya penegeahuan tentang program ini.

3.4.3 Komitmen Bersama

Adanya komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk melaksanakan penanganan odgj di Kota Medan. Pemerintah menunjukkan dedikasinya dengan memberikan bantuan berupa obat, rehabilitasi, alat dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung operasional. Selain itu, komitmen utama yang dipegang adalah terwujudnya masyarakat kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif serta memberikan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan visi kota Medan. Mengakui adanya keterbatasan informasi mengenai jumlah odgj yang terus bertambah dan fasilitas penunjang rehabilitasi dan mobil angkutan. Hal ini memungkinkan mereka memberikan pelayanan terbaik, menegakkan aturan-aturan yang ditetapkan dan

telah ada, dan memastikan penanganan odgJ berjalan dengan baik. Seperti yang dipaparkan oleh dinas sosial terkait komitmen ini bahwa :

“kami dari petugas Dinsos sudah melaksanakan tugas kami sesuai dengan tupoksi yang ada. Seperti melakukan pembinaan, respon kasus, pelaporan, dan mengassasment. Dalam melakukan pembinaan, kami mempunyai rumah singgah. Rumah singgah ini biasanya diperuntukkan untuk pasien yang tidak mempunyai keluarga, ada juga pasien yang masih ada keluarga tinggal disana. Untuk selebihnya bukan tupoksi kami melainkan bagian dari kesehatan dalam menangani skizofrenia. Kami siap berpartisipasi dalam tim koordinasi dengan porsi tugas masing-masing. Sebenarnya kalau dilihat dari tugas yang sama-sama dilakukan oleh kedua dinas, membuktikan sudah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan (Hasil wawancara dengan ibu Marience selaku kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial kota Medan, tanggal Kamis 28 November 2024)

Dinas Kesehatan sudah berupaya melakukan tugas sesuai dengan tugas fungsi yang ada. Salah satunya dari Dinas Kesehatan adalah melakukan pengobatan, serta rehab medis, dan juga pengontrolan kepada pasien, seperti yang dijelaskan oleh

“Kami sangat berkomitmen dalam penanganan odgJ. Terutama untuk membantu Kesehatan jiwa penderita odgJ dengan cara merehabilitasi mereka sampai mereka bisa melakukan aktifitas seperti masyarakat biasa. Kami Dinkes melakukan pengobatan medis, seperti pemberian obat, rehab medis di rumah sakit, pengontrolan saat sedang di rawat ataupun sudah dipulangkan. Kami dari Dinkes selalu berusaha agar memberikan tanggung jawab kami selaku petugas medis. Karna kasus skizofrenia ini rumit butuh waktu untuk mendekati diri kepada korban, agar dia tidak merasa tertekan. Kalau untuk komitmen dalam melaksanakan tugas penanganan, untuk sekarang kalau ada kasus penanganan yang ditangani, kalau tidak ada kasus yaudah,” (Hasil wawancara dengan ibu Ratna Dewi selaku penanggung jawab seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan, tanggal 13 November 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki tujuan yang sama dalam kolaborasi, akan tetapi komitmen yang ada diantara setiap stakeholders belum dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan dalam penanganan kasus skizofrenia ini tidak secara terus menerus dilaksanakan, karena tidak setiap waktunya ada pasien skizofrenia, dan setiap dinas melakukan penanganan secara sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

3.4.4 Pemahaman Bersama

Ansell dan Gash (2007), pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai sangat penting. Hal ini memerlukan pembelajaran bersama, dimana semua pihak saling berbagi informasi dan pengetahuan untuk mencapai visi yang komprehensif dan seragam Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan pemahaman setiap pemangku kepentingan terkait penanganan kejiwaan sudah cukup. Hal ini tercapai melalui pleatihan, sosialisasi, dan pembagian informasi yang jelas yang diberikan kepada para pelaksana. Pemahaman yang baik ini sangat penting karena kejiwaan yang normal tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kehidupan yang baik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung perencanaan kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan memperkuat peran masyarakat. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Dinas Sosial bahwa:

“Penanganan ODGJ didasarkan pada konsep rehabilitasi sosial dan pemenuhan hak-hak dasar ODGJ. ODGJ sendiri memiliki hak untuk hidup dengan layak, menerima perlindungan, serta mendapat akses ke layanan kesehatan dan rehabilitasi. Menghilangkan stigma dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung pemulihan ODGJ” (Hasil wawancara dengan ibu Ratna Dewi selaku penanggung jawab seksi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa di Dnas Kesehatan kota medan, tanggal 13 November 2024)

Pemahaman masyarakat terkait program edukasi kejiwaan Kota Medan bervariasi. Beberapa warga merasa bahwa tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan manfaat program kejiwaan. Ada warga yang mengakui bahwa pemahaman mereka masih terbatas dan membutuhkan lebih banyak informasi dan komunikasi dari pemerintah. Meskipun ada sebagian masyarakat yang merasa pemahaman mereka cukup baik, sebagian lainnya menganggap bahwa perlu dilakukan lebih banyak sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang program ini. Kesimpulannya, meskipun ada upaya untuk memberikan edukasi, masih diperlukan peningkatan dalam penyebaran informasi dan komunikasi agar pemahaman tentang program siaga sehat jiwa dapat merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance dalam penanganan penderita skizofrenia di Kota Medan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas program. Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kondisi awal yang baik antara pemangku kepentingan serta desain kelembagaan yang jelas. Nota Kesepahaman (MoU) menjadi landasan penting untuk mengatur peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam mendukung keberlanjutan kolaborasi. Namun, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi pelaksanaan program ini. Keterbatasan sumber daya, seperti dana, fasilitas, dan tenaga ahli, menjadi kendala utama. Selain itu, stigma negatif yang melekat di masyarakat terhadap penderita skizofrenia memperburuk penerimaan sosial dan menghambat rehabilitasi mereka. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendukung ODGJ turut menjadi tantangan signifikan. Banyak individu dengan gangguan jiwa masih diisolasi secara sosial akibat stigma dan diskriminasi, yang berisiko memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi publik yang masif untuk mengubah persepsi masyarakat.

Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, menyediakan sumber daya yang memadai, dan menghapus stigma sosial, Kota Medan memiliki peluang untuk mengembangkan sistem rehabilitasi yang lebih efektif dan manusiawi. Dukungan kebijakan yang kuat dan partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi collaborative governance.

Referensi

- Abdurahmat, (2008). Efektivitas Organisasi. Edisi Pertama, Airlangga.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18 (4) 543-571.
- Dwiyanto, A (2018). Ilmu Administrasi Publik Di Indonesia, Mencari Identitas. Gadjah Mada University Press.
- Government Of Canada (2008). Collaborative Governance And Changing Federal Roles Noor Muhammad, et al (2022). Collaborative governance. Yogyakarta : Bildung.
- Praastowo, A (2012). Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Retno S., Hardi Warsono., & Abd. Rachim (2020). Collaborative Governance Dalam Prespektif Administrasi Publik. Semarang: DAP Press.
- Soeryabrata (1998). Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo
- Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sumardi

Jurnal

- Angga Arista (2024) Collaborative Governance Dalam Penanganan ODGJ Terlantar Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
- Damanik, F. H. A. (2024). Pelayanan Aduan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Melalui Aplikasi Halo Satpol PP Di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Dewi, E. I., & Rasni, H. (2016). Pengalaman Keluarga dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Pasung di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember (The Family Experience in Fulfilling the Needs of the Self-care of People with Chronic Mental Health Ill. *Pustaka Kesehatan*, 4(1), 78-85.
- Lumbantoruan, S. (2019). Gambaran Standar Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien 91 92 Gangguan Jiwa Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Bina Karsa Medan Tahun 2019 (Doctoral dissertation, INSTITUT KESEHATAN HELVETIA).
- Maulana, I., Suryani, S., Sriati, A., Sutini, T., Widiyanti, E., Rafiah, I., Hidayati, N. O., Hernawati, T., Yosep, I., & Hendrawati, H. (2019). Penyuluhan Kesehatan Jiwa untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Masalah Kesehatan Jiwa di Lingkungan Sekitarnya. *Media Karya Kesehatan*, 2(2).
- Nadia Khumairatun Nisa (2023) Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung
- Naomi, D., Gustina, E., & Purwaningsih, P. (2022). Komunikasi Terapeutik Perubahan Perilaku Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Bina Karsa Medan Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan dan Fisioterapi*, 33-41.
- Panggabean, M. (2023). Hambatan Proses Komunikasi Terapeutikperawat Dengan Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Rumah Sakit Jiwa Bina Karsa Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D. Pustaka Pelajar.Yogyakarta
- Voni Leorna(2021) Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Berkeliaran Di Kota Bandar Lampung (Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja
- Zahratul Fajria(2021) Collaborative Governance Dalam Penanganan Penderita Skizofrenia Di Kota Banda Aceh